



BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 17 TAHUN 2012



KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140.2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140.2/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Acara Negara Tahun 2011 Nomor 491);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau;

12

5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi kepentingan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur/ pengecer resmi di Lini IV;
10. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/ kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
11. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
12. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk;
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan ternak dan Budidaya Ikan dan/ atau Udang;
14. Petani adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;
15. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya perkebunan dengan luasan tertentu;
16. Peternak adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
17. Pembudidaya ikan atau Udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
18. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik di dalam Negeri;

17

19. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda;
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
22. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.;
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar dan setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012;

15

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini;
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Koordinator BPP setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan;
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lamandau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan;
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di satu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen;
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur resmi Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;

↳

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3);
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai suatu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) di Kabupaten Lamandau.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus; yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

11

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur resmi Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg atau 25 Kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 Kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Lamandau melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Koordinator BPP, Penyuluh Pertanian, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

✓

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Lamandau wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 229

DINAS PERTANIAN PETERNAKAN, PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KADIS	
4. SEKRETARIS	
5. KABID	
6. KASUBAG	

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBAG	
6. PELAKSANA	

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

Lampiran I Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
MENURUT SUB SEKTOR

(Ton)

Sub Sektor	Jenis Pupuk				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
- Tanaman Pangan	522.16	72.39	18.52	1,183.18	125.40
- Hortikultura	100.68	10.90	3.56	61.22	10.03
- Perkebunan Rakyat	174.90	124.58	9.87	484.95	37.77
- Peternakan	2.22	-	-	-	-
- Perikanan Budidaya	29.16	1.25	-	-	0.45
JUMLAH	829.12	209.12	31.95	1,729.35	173.65

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	TAMBAH
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

Lampiran II Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010

(Ton)

No	Jenis Pupuk/Sektor / Sub Sektor	Kebutuhan Pupuk Setiap Bulan												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
I.	UREA													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	15.76	17.16	16.46	211.23	42.99	32.52	22.74	32.52	22.74	32.52	32.52	42.99	522.16
	- Hortikultura	8.85	8.85	10.24	8.85	7.47	8.85	7.47	7.47	7.47	8.85	8.85	7.47	100.68
	b. Perkebunan	15.73	15.73	21.28	15.73	11.57	15.73	12.96	11.57	11.57	15.73	15.73	11.57	174.90
	c. Peternakan	0.28	0.14	0.14	0.14	0.14	0.28	0.14	0.14	0.14	0.28	0.28	0.14	2.22
	d. Perikanan Budidaya	2.78	2.78	4.17	2.78	2.78	2.78	1.39	1.39	1.39	2.78	2.78	1.39	29.16
	Jumlah	43.39	44.66	52.29	238.73	64.95	60.15	44.70	53.09	43.31	60.15	60.15	63.56	829.12
II.	SP-36													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	6.10	7.08	7.08	5.25	6.10	5.13	5.13	6.10	6.10	5.13	7.08	6.10	72.39
	- Hortikultura	0.52	0.52	1.04	1.04	0.52	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	10.90
	b. Perkebunan	10.37	10.37	10.49	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	124.58
	c. Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Perikanan Budidaya	0.10	-	0.21	-	0.52	0.42	-	-	-	-	-	-	1.25
	Jumlah	17.09	17.97	18.82	16.66	17.51	16.96	16.54	17.51	17.51	16.54	18.49	17.52	209.12
III.	ZA													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	1.44	1.44	2.84	-	2.84	-	-	-	2.84	2.84	2.14	2.14	18.52
	- Hortikultura	-	-	0.89	0.89	0.89	-	-	0.89	-	-	-	-	3.56
	b. Perkebunan	1.79	1.79	0.90	0.90	-	1.79	-	0.90	-	1.79	-	-	9.87
	c. Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.23	3.23	4.63	1.79	3.73	1.79	-	1.79	2.84	4.63	2.14	2.14	31.95

Handwritten signature/initials.

No	Jenis Pupuk /Sektor / Sub Sektor	Kebutuhan Pupuk Setiap Bulan												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
IV.	NPK													
a.	Tanaman Pangan dan Hortikultura													
-	Tanaman Pangan	100.30	96.90	100.30	96.90	102.00	96.90	100.30	96.90	96.90	96.90	96.90	102.00	1,183.18
-	Hortikultura	3.40	3.40	3.40	3.40	6.80	3.40	3.40	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	61.22
b.	Perkebunan Rakyat	40.13	43.53	36.73	36.73	40.13	43.53	36.73	43.53	43.53	36.73	43.53	40.13	484.95
c.	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	143.83	143.83	140.43	137.03	148.93	143.83	140.43	147.23	147.22	140.43	147.23	148.93	1,729.35
V.	ORGANIK													
a.	Tanaman Pangan dan Hortikultura													
-	Tanaman Pangan	7.60	7.60	7.60	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	125.40
-	Hortikultura	0.56	0.56	0.56	0.56	1.11	0.56	0.56	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	10.03
b.	Perkebunan	5.40	5.40	5.40	5.40	-	5.40	-	5.40	-	5.40	-	-	37.77
c.	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Perikanan Budidaya	0.04	-	0.08	-	0.19	0.15	-	-	-	-	-	-	0.45
	Jumlah	13.60	13.56	13.64	17.36	12.70	17.50	11.96	17.91	12.51	17.91	12.51	12.51	173.65

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

Lampiran IV Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : HORTIKULTURA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	1.5	1.5	2	1.5	1.27	1.5	1.27	1.27	1.27	1.5	1.5	1.27	17.35
2. Bulik Timur	1.5	1.5	1.4	1.5	1	1.5	1	1	1	1.5	1.5	1	15.40
3. Menthobi Raya	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1	1	1	1.5	1.5	1	15.50
4. Sematu Jaya	1.5	1.5	2.5	1.5	1.25	1.5	1.25	1.25	1.25	1.5	1.5	1.25	17.75
5. Belantikan Raya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
6. Lamandau	0.85	0.85	0.84	0.85	0.95	0.85	0.95	0.95	0.95	0.85	0.85	0.95	10.68
7. Batang Kawa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6.00
8. Delang	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6.00
Kabupaten Lamandau	8.85	8.85	10.24	8.85	7.47	8.85	7.47	7.47	7.47	8.85	8.85	7.47	100.68

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KAUDE	
6. PELAKSANA	

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

f

Lampiran III Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : TANAMAN PANGAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	2.20	2.20	2.15	12.00	6.19	3.25	4.00	3.25	3.59	3.25	3.25	6.19	51.52
2. Bulik Timur	2.75	3.15	3.00	25.00	7.45	5.40	5.00	4.00	3.50	5.40	5.40	7.45	77.50
3. Menthobi Raya	4.06	4.06	3.15	64.00	8.00	8.00	5.00	8.00	5.00	8.00	8.00	8.00	133.27
4. Sematu Jaya	5.25	6.25	6.00	69.75	9.00	9.00	5.00	9.00	5.00	9.00	9.00	9.00	151.25
5. Belantikan Raya	0.75	0.75	1.00	20.00	5.00	3.40	2.00	3.52	2.25	3.40	3.40	5.00	50.47
6. Lamandau	0.45	0.45	0.75	10.00	6.00	2.00	0.74	3.00	2.00	2.00	2.00	6.00	35.39
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	2.48	0.35	0.97	0.00	1.00	0.00	0.97	0.97	0.35	7.10
8. Delang	0.30	0.30	0.41	8.00	1.00	0.50	1.00	0.75	1.40	0.50	0.50	1.00	15.66
Kabupaten Lamandau	15.76	17.16	16.46	211.23	42.99	32.52	22.74	32.52	22.74	32.52	32.52	42.99	522.16

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]
MARUKAN

[Signature]

Lampiran V Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : PERKEBUNAN

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	4.20	4.20	6.00	4.20	3.15	4.20	4.00	3.15	3.15	4.20	4.20	3.15	47.80
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menthobi Raya	6.00	6.00	7.50	6.00	3.77	6.00	4.31	3.77	3.77	6.00	6.00	3.77	62.89
4. Sematu Jaya	5.53	5.53	7.78	5.53	4.65	5.53	4.65	4.65	4.65	5.53	5.53	4.65	64.21
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Lamandau	15.73	15.73	21.28	15.73	11.57	15.73	12.96	11.57	11.57	15.73	15.73	11.57	174.90

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

Marukan

MARUKAN

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

f

Lampiran VI Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : PETERNAKAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.02	0.36
2. Bulik Timur	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.03	0.46
3. Mentobi Raya	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.32
4. Sematu Jaya	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.02	0.36
5. Belantikan Raya	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12
6. Lamandau	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12
7. Batang Kawa	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12
8. Delang	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.02	0.36
Kabupaten Lamandau	0.28	0.14	0.14	0.14	0.14	0.28	0.14	0.14	0.14	0.28	0.28	0.14	2.22

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	ARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBDAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

[Handwritten mark]

Lampiran VII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor

: PERIKANAN BUDIDAYA

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.15	0.15	0.75	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.20	2.60
2. Bulik Timur	0.45	0.45	0.65	0.45	0.45	0.45	0.20	0.20	0.20	0.45	0.45	0.20	4.60
3. Menthobi Raya	0.50	0.50	0.65	0.50	0.50	0.50	0.27	0.27	0.27	0.50	0.50	0.27	5.23
4. Sematu Jaya	0.65	0.65	0.42	0.65	0.65	0.65	0.20	0.20	0.20	0.65	0.65	0.20	5.77
5. Belantikan Raya	0.13	0.13	0.25	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	1.61
6. Lamandau	0.35	0.35	0.50	0.35	0.35	0.35	0.10	0.10	0.10	0.35	0.35	0.10	3.35
7. Batang Kawa	0.20	0.20	0.35	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	2.15
8. Delang	0.35	0.35	0.60	0.35	0.35	0.35	0.20	0.20	0.20	0.35	0.35	0.20	3.85
Kabupaten Lamandau	2.78	2.78	4.17	2.78	2.78	2.78	1.39	1.39	1.39	2.78	2.78	1.39	29.16

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARTISIPAN
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

[Signature]

Lampiran VIII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : TANAMAN PANGAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.95	1.00	1.00	0.65	0.95	0.85	0.85	0.95	0.95	0.85	1.00	0.95	10.95
2. Bulik Timur	1.00	1.15	1.15	0.75	0.95	0.75	0.75	1.00	1.00	0.75	1.15	0.95	11.35
3. Menthobi Raya	1.40	1.00	1.00	0.85	0.85	0.85	0.85	1.40	1.40	0.85	1.00	0.85	12.31
4. Sematu Jaya	1.15	1.25	1.25	1.00	1.15	0.85	0.85	1.15	1.15	0.85	1.25	1.15	13.05
5. Belantikan Raya	0.90	1.00	1.00	0.50	1.00	0.50	0.50	0.90	0.90	0.50	1.25	1.25	10.20
6. Lamandau	0.50	0.58	1.08	1.00	1.00	0.83	0.83	0.50	0.15	0.40	0.75	0.15	7.77
7. Batang Kawa	0.05	0.10	0.10	0.10	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.10	0.10	0.05	0.95
8. Delang	0.15	1.00	0.50	0.40	0.15	0.40	0.40	0.15	0.50	0.83	0.58	0.75	5.81
Kabupaten Lamandau	6.10	7.08	7.08	5.25	6.10	5.13	5.13	6.10	6.10	5.13	7.08	6.10	72.39

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN



Lampiran IX Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : HORTIKULTURA

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.08	0.08	0.16	0.16	0.08	0.16	0.16	0.14	0.16	0.16	0.14	0.16	1.64
2. Bulik Timur	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.22	0.20	0.20	0.22	0.20	2.14
3. Menthobi Raya	0.12	0.12	0.24	0.24	0.12	0.24	0.20	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	2.48
4. Sematu Jaya	0.12	0.12	0.24	0.24	0.12	0.24	0.24	0.20	0.24	0.24	0.20	0.24	2.44
5. Belantikan Raya	0.04	0.04	0.08	0.08	0.04	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10	0.08	0.86
6. Lamandau	0.03	0.03	0.06	0.06	0.03	0.06	0.10	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.71
7. Batang Kawa	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.21
8. Delang	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.42
Kabupaten Lamandau	0.52	0.52	1.04	1.04	0.52	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	10.90

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	MARUKAN
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

Lampiran X Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : PERKEBUNAN

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	3.00	3.00	3.24	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.24
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menthobi Raya	3.37	3.37	3.25	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	40.34
4. Sematu Jaya	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Lamandau	10.37	10.37	10.49	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	10.37	124.58

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PASS
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

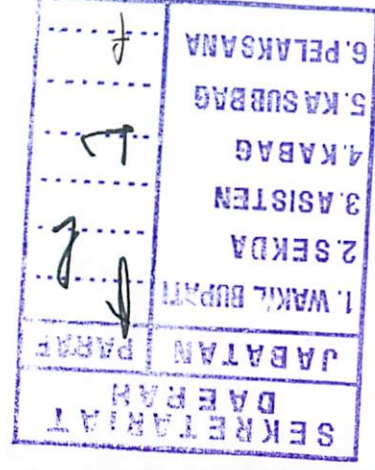


KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : PETERNAKAN

Kecamatan	Kabupaten Lamandau											
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1. Bulik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bulik Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Menthobi Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sematu Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Delang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah												

(Ton)



BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN

52

Lampiran XII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor

: PERIKANAN BUDIDAYA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.03	0.00	0.12	0.00	0.22	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
3. Menthobi Raya	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
4. Sematu Jaya	0.07	0.00	0.02	0.00	0.22	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
6. Lamandau	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
8. Delang	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
Kabupaten Lamandau	0.10	0.00	0.21	0.00	0.52	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

[Handwritten mark]

Lampiran XIII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : TANAMAN PANGAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.20	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	2.80
2. Bulik Timur	0.20	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	2.80
3. Menthobi Raya	0.24	0.24	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.44	0.44	3.12
4. Sematu Jaya	0.25	0.25	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.40	0.40	3.30
5. Belantikan Raya	0.15	0.15	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	2.10
6. Lamandau	0.20	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.10	0.10	2.20
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.20	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.10	0.10	2.20
Kabupaten Lamandau	1.44	1.44	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	2.14	2.14	18.52

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	DAERAH
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]
MARUKAN

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

[Signature]

Lampiran XIV Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor

: HORTIKULTURA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
3. Menthobi Raya	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
4. Sematu Jaya	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
6. Lamandau	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
Kabupaten Lamandau	0.00	0.00	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PADA
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

Marukan
MARUKAN

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

f
2

Lampiran XV Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : PERKEBUNAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.44	0.44	0.25	0.25	0.00	0.44	0.00	0.25	0.00	0.44	0.00	0.00	2.51
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menthobi Raya	0.60	0.60	0.25	0.25	0.00	0.60	0.00	0.25	0.00	0.60	0.00	0.00	3.16
4. Sematu Jaya	0.75	0.75	0.40	0.40	0.00	0.75	0.00	0.40	0.00	0.75	0.00	0.00	4.20
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Lamandau	1.79	1.79	0.90	0.90	0.00	1.79	0.00	0.90	0.00	1.79	0.00	0.00	9.87

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN



DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

Lampiran XVI Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : PETERNAKAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menthobi Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sematu Jaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

[Signature]

Lampiran XVII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : TANAMAN PANGAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	15.00	14.50	16.00	19.00	17.00	14.50	16.00	19.85	14.50	14.50	14.50	18.00	193.35
2. Bulik Timur	17.00	16.50	16.00	17.00	18.00	16.50	17.00	16.50	16.50	19.00	19.85	15.00	204.85
3. Menthobi Raya	18.00	19.85	19.00	14.85	15.00	19.85	20.00	14.50	19.85	17.35	16.50	20.00	214.75
4. Sematu Jaya	22.00	20.95	22.00	20.95	22.00	20.95	22.00	20.95	20.95	20.95	20.95	19.00	253.63
5. Belantikan Raya	10.00	8.65	10.00	8.65	10.00	8.65	10.00	8.65	8.65	8.65	8.65	10.00	110.55
6. Lamandau	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.15	6.00	9.00	10.00	8.00	99.15
7. Batang Kawa	2.30	2.30	2.30	2.30	2.00	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.00	27.00
8. Delang	8.00	2.15	7.00	6.15	10.00	8.15	5.00	6.00	8.15	5.15	4.15	10.00	79.90
Kabupaten Lamandau	100.30	96.90	100.30	96.90	102.00	96.90	100.30	96.90	96.90	96.90	96.90	102.00	1,183.18

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

[Signature]

Lampiran XVIII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor

: HORTIKULTURA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	10.80
2. Bulik Timur	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	10.80
3. Menthobi Raya	0.70	0.70	0.70	0.70	1.40	0.70	0.70	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	12.60
4. Sematu Jaya	0.80	0.80	0.80	0.80	1.60	0.80	0.80	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	14.40
5. Belantikan Raya	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	3.60
6. Lamandau	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	3.60
7. Batang Kawa	0.18	0.18	0.18	0.18	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	3.26
8. Delang	0.12	0.12	0.12	0.12	0.24	0.12	0.12	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	2.16
Kabupaten Lamandau	3.40	3.40	3.40	3.40	6.80	3.40	3.40	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	61.22

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	MARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

[Signature]

Lampiran XIX Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : PERKEBUNAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	12.00	13.00	10.23	10.23	12.00	13.00	10.23	13.00	13.00	10.23	13.00	12.00	141.92
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menthobi Raya	13.13	15.53	14.00	14.00	13.13	15.53	11.00	15.53	15.53	12.50	15.53	13.13	168.53
4. Sematu Jaya	15.00	15.00	12.50	12.50	15.00	15.00	15.50	15.00	15.00	14.00	15.00	15.00	174.50
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Lamandau	40.13	43.53	36.73	36.73	40.13	43.53	36.73	43.53	43.53	36.73	43.53	40.13	484.95

SEKRETARAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

[Signature]

Lampiran XX Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : TANAMAN PANGAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	1.10	1.10	1.10	2.35	2.25	2.35	2.35	2.35	2.15	2.35	2.05	2.35	23.85
2. Bulik Timur	1.10	1.10	1.10	1.85	1.95	1.85	1.85	1.85	2.05	1.85	2.15	1.85	20.55
3. Menthobi Raya	1.55	1.55	1.55	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	26.70
4. Sematu Jaya	1.60	1.60	1.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	28.20
5. Belantikan Raya	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	8.25
6. Lamandau	0.85	0.85	0.85	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	8.85
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.00
Kabupaten Lamandau	7.60	7.60	7.60	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	125.40

SEKRETERAN DAERAH	
JABATAN	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]
MARUKAN

[Signature]

Lampiran XXI Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor : HORTIKULTURA

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.10	0.10	0.10	0.10	0.21	0.10	0.10	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	1.86
2. Bulik Timur	0.10	0.10	0.10	0.10	0.18	0.10	0.10	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	1.68
3. Menthobi Raya	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.80
4. Sematu Jaya	0.12	0.12	0.12	0.12	0.27	0.12	0.12	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	2.35
5. Belantikan Raya	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.90
6. Lamandau	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.72
7. Batang Kawa	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.36
8. Delang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.36
Kabupaten Lamandau	0.56	0.56	0.56	0.56	1.11	0.56	0.56	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	10.03

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	↓
2. SEKDA	↓
3. ASISTEN	↓
4. KABAG	↓
5. KASUBBAG	↓
6. PELAKSANA	f

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

[Handwritten mark]

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

Lampiran XXII Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor

: PERKEBUNAN

(Ton)

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	1.45	1.45	1.40	1.45	0.00	1.45	0.00	1.42	0.00	1.45	0.00	0.00	10.07
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menthobi Raya	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.70	0.00	2.00	0.00	0.00	13.70
4. Sematu Jaya	1.95	1.95	2.00	1.95	0.00	1.95	0.00	2.28	0.00	1.95	0.00	0.00	14.00
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Lamandau	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	37.77

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]
MARUKAN

[Handwritten mark]

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor

: PETERNAKAN

(Ton)

Kecamatan	Kabupaten Lamandau												
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1. Bulik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bulik Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Menthobi Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4. Sematu Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5. Belantikan Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Batang Kawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Delang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEKRETARIAT DAERAH	JABATAN PAKSA	1. WAKIL BUPATI	2. SEKDA	3. ASISTEN	4. KABAG	5. KASUBBAG	6. PELAKSANA

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

BUPATI LAMANDAU,
[Signature]
MARUKAN

[Signature]

Lampiran XXIV Peraturan Bupati Lamandau

Nomor :

Tanggal : _____

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor

: PERIKANAN BUDIDAYA

Kecamatan	Bulan												Jumlah
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1. Bulik	0.00	0.00	0.04	0.00	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2. Bulik Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Menthobi Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
4. Sematu Jaya	0.04	0.00	0.04	0.00	0.09	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
5. Belantikan Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Lamandau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Batang Kawa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Delang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten Lamandau	0.04	0.00	0.08	0.00	0.19	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

MARUKAN

[Signature]

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	